

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR 0206/PDT.G/2015/PA.PCT. TENTANG IZIN POLIGAMI**

Oleh

Miftahul Anam, NIM 1814101077

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan secara utuh pengaturan hukum poligami di Indonesia serta memberikan gambaran secara utuh tentang (1) Pengaturan poligami di Indonesia. (2) Analisis yuridis pada putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pengaturan poligami di Indonesia sendiri baik dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. (2) Hasil analisis putusan Nomor 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. tentang Izin Poligami telah memenuhi ketentuan ketentuan perundang-undangan yang mengatur poligami di Indonesia, hal ini terbukti dalam pertimbangan bahwasanya pemohon sudah memenuhi syarat alternatif dan kumulatif yang dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu proses pelaksanaan pemberian izin poligami sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 dan Pasal 44.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Putusan Nomor 0206/PDT.G/2015/PA.PCT., Poligami

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF THE PACITAN
RELIGIOUS COURT NUMBER 0206/PDT.G/2015/PA.PCT. ON POLYGAMY
PERMITS**

By

Miftahul Anam, NIM 1814101077

Law Study Program

ABSTRACT

This study aims to find out and describe in full the legal regulations on polygamy in Indonesia and provide a complete picture of (1) The legal regulations on polygamy in Indonesia. (2) Juridical analysis of the decision Number 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. This study uses a normative legal research type using the statute approach and the case approach. The results of this study indicate that: (1) The regulation of polygamy in Indonesia itself, both in Positive Law and Islamic Law, is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law and Law Number 50 of 2009 regarding the Two Laws Number 7 of 1989. (2) The results of the analysis of Number 0206/Pdt.G/2015/PA.Pct. concerning Polygamy Permits have fulfilled the provisions of the laws and regulations governing polygamy in Indonesia, this is proven in the consideration that the applicant has fulfilled the alternative and cumulative requirements explained in Article 4 Paragraph (2) and Article 5 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. In addition, the process of implementing the granting of polygamy permits is in accordance with Law Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 40 and Article 44.

Keywords : *Juridical Analysis, Decision Number 0206/PDT.G/2015/PA.PCT., Polygamy*